

Asuransi Umum dan Perkembangan Ekonomi Indonesia: *Secercah Asa Ditengah Badai Menghadang*

Budi Hermana
Staff Pengajar Universitas Gunadarma
bhermana@staff.gunadarma.ac.id

Pendahuluan

"Industri asuransi umum sedang mengalami krisis. Tahun 2006, pendapatan premi hanya tumbuh 3,6 persen dan tahun ini kondisinya diperkirakan tidak jauh berbeda. Karena itu, regulator harus bertindak". Demikianlah sepenggal kalimat dari harian Kompas yang dikutip di situs internet yang dikelola oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), yang masih tertera sampai tanggal 13 Desember 2007. Terlepas dari suara keprihatinan dan pesimisme yang tersurat dan tersirat lebih dominan, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya di industri asuransi umum memang menghadapi tantangan berat dalam menumbuhkan industri asuransi umum di Indonesia. Tantangan lebih berat lagi adalah apakah asuransi umum sudah mencapai tahap dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Atau malah sebaliknya, asuransi umum di Indonesia baru sampai pada tahap masih menggantungkan pada pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh dan berkembang menjadi industri asuransi umum yang kuat.

Secara teoritis hubungan asuransi umum dan pertumbuhan ekonomi tersebut bisa bersifat *causal relationship*, tetapi pertanyaan kritisnya sama saja yaitu mana yang lebih kuat sebagai kontributor utama? Pertumbuhan ekonomi mendukung pertumbuhan asuransi umum atau pertumbuhan asuransi umum mendukung pertumbuhan ekonomi? Jawabannya memerlukan analisis yang mendalam, yang menggabungkan perspektif teoritis dan empiris. Sudut pandang teoritis berarti membahas tentang prinsip asuransi umum terkait dengan sumber dan penggunaan dana- yang berhubungan dengan mobilisasi dana masyarakat dalam bentuk premi dan pengelolaan dana tersebut untuk tujuan investasi. Prinsip tersebut selanjutnya dikaitkan dengan posisi asuransi umum sebagai lembaga keuangan dalam mekanisme *circular flow of income*- sebuah model ekonomi sederhana yang menggambarkan saling keterhubungan antara pelaku ekonomi.

Berbicara di tataran empiris berarti memaparkan perkembangan profil atau kondisi industri asuransi umum di Indonesia, yang mencakup aspek regulasi; perkembangan jumlah perusahaan beserta indikator-indikator keuangannya; serta situasi dan permasalahan dalam

persaingan pasar. Ukuran dan pemaparan tersebut tentunya berhubungan dengan pelaku asuransi umum di Indonesia- yang sampai tahun 2007 ini tercatat sebanyak 92 perusahaan asuransi umum- yang 74 perusahaan diantaranya masih mempunyai modal di bawah 100 Milyar (AAUI, 2007). Deskripsi awal tersebut masih sebatas dalam lingkup lokal atau nasional. Posisi Indonesia di lingkungan global dalam "dunia perasuransian" juga perlu dijadikan kerangka berfikir dalam menganalisis hubungan antara pertumbuhan asuransi umum dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Dalam perspektif global kita berbicara masalah "best practices" atau "lesson learnt" dari pengalaman negara lain yang bisa dijadikan "benchmark"; serta posisi Indonesia di lingkungan global dilihat dari indikator "insurance penetration rate" dan "insurance density", serta indikator lainnya yang memang relatif masih memprihatinkan. Sebagai gambaran umum saja, berdasarkan pada nilai "global competitiveness index"- sebuah indikator komposit yang disusun oleh *Global Economic Forum*, Indonesia menempati urutan ke-54 pada tahun 2007 ini. Bandingkan dengan posisi Singapura, Malaysia, dan Thailand yang berturut-turut menempati posisi ke-7, 21, dan 28 (*Global Economic Forum*, 2007).

Analisis teoritis dan empiris yang mencakup kondisi nasional dan posisi global tersebut merupakan kerangka dasar atau argumentasi dalam membangun agenda strategis untuk industri asuransi umum di Indonesia- yang dikaitkan dengan perkembangan ekonomi nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan industri asuransi umum yang kuat dan sehat serta dapat memberikan kontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kondisi Nasional: Kritis dan Tertinggal

"Delapan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya itu terdiri dari tiga perusahaan asuransi umum atau kerugian dan lima perusahaan asuransi jiwa..... Dari proses klarifikasi dapat disimpulkan bahwa pemegang saham tidak melakukan langkah- langkah konkret untuk mengatasi permasalahan perusahaan"

Fuad Rahmany- Ketua Bapepam-LK

"Akibat tingginya kasus penolakan klaim oleh perusahaan asuransi, membuat jasa asuransi mendapat sorotan tajam dari masyarakat"

Arizal ER- Ketua Badan Mediasi Asuransi Indonesia

Prinsip pengelolaan dana asuransi umum mencakup dua sisi atau perspektif yang saling terkait. Sisi pertama adalah memberikan perlindungan terhadap kekayaan individu atau institusi- yang pembiayaan pembayaran klaimnya bersumber dari akumulasi nilai premi yang diberikan oleh individu atau institusi. Fungsi kedua adalah penggunaan akumulasi dana premi yang terkumpul tersebut- yang selain berfungsi sebagai sumber utama cadangan klaim, juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan untuk lembaga keuangan lainnya- melalui prinsip *circular flow of income*. Prinsip sumber dan penggunaan dana asuransi tersebut menjadi landasan utama dalam membahas hubungan antara asuransi umum dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Lalu bagaimana mengenai besaran sumber dan dana asuransi umum tersebut saat ini?

Pada tahun 2007 ini jumlah perusahaan asuransi umum di Indonesia tercatat sebanyak 92 perusahaan dengan mobilisasi dana masyarakat dalam bentuk premi tercatat sebanyak Rp 19,3 triliun. Jika menggunakan data estimasi World Insurance Outlook pada tahun 2006, nilai premi tersebut hanya 0,6 persen dari PDB Indonesia yang tercatat sebesar US\$ 364 juta. Jika nilai premi tersebut dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 225 juta orang maka premi per kapita untuk Indonesia hanya sebesar US\$ 9 per orang per tahun. Angka-angka kinerja asuransi umum tersebut dibandingkan dengan asuransi jiwa dan lembaga keuangan bank dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

No.	Indikator Keuangan	Asuransi Umum	Asuransi Jiwa	Bank
1.	Jumlah perusahaan	92		130
2.	Total Aset		82 triliun	1801 Triliun
3.	Premi/dana masyarakat	19,3 Triliun	26,8 triliun	1562 Triliun
4.	Persentase Premi/simpanan bank terhadap PDB	0,6%	0,8%	170%
5.	Premi/simpanan bank per kapita	Rp 85,5 ribu per orang	Rp 118,75 ribu per orang	Rp 6,9 juta per orang

Keterangan:

- Nilai premi asuransi berdasarkan estimasi World Insurance Outlook yaitu sebesar US\$ 2822 juta untuk jiwa dan US\$ 2027 juta. Nilai kurs yang digunakan adalah Rp 9500/US\$
- Persentase nilai premi terhadap PDB menggunakan estimasi World Insurance Outlook 2006, sedangkan untuk bank menggunakan data dari Bank Indonesia sampai Juli 2007 dengan nilai nominal PDB sebesar Rp 915,9 triliun.
- Premi per kapita menggunakan World Insurance Outlook 2006, sedangkan simpanan bank dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 225 juta orang.

Tabel di atas menunjukkan bahwa asuransi umum belum menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan asuransi jiwa atau bank. Angka tersebut bisa diartikan juga bahwa peran asuransi umum masih bersifat mikro yaitu memobilisasi premi dari

masyarakat untuk kepentingan "memupuk" cadangan klaim yang merupakan kewajiban asuransi umum ketika resiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. Bandingkan dengan bank yang sudah sampai pada tahap menyalurkan kembali dana masyarakat dalam bentuk investasi- misalnya melalui penyaluran kredit, pembelian surat-surat berharga atau penyertaan (modal) ke perusahaan terafiliasi. Asuransi umum mungkin sisi investasinya harus hati-hati dan lebih banyak pada pilihan investasi yang "super aman"- misalnya dalam bentuk deposito jangka panjang yang tersimpan di bank-bank.

Kemampuan investasi yang masih rendah tersebut- yang berarti daya dukungnya terhadap pertumbuhan sektor riil masih rendah, memang terkait dengan kemampuan memobilisasi premi dari masyarakat yang menggunakan (membeli) jasa asuransi umum. Berdasarkan data dari Biro Riset InfoBank, tahun 2006 premi asuransi jiwa secara nasional Rp 27,44 triliun, tumbuh 23,15 persen dibandingkan tahun 2005. Sementara dalam periode yang sama, premi asuransi umum sebesar Rp 15,5 triliun, hanya bertumbuh 3,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan premi sebesar itu, nilai premi asuransi jiwa kurang dari 1 persen dari dana masyarakat yang tersimpan di bank yang sampai tahun 2007 ini sudah mencapai lebih dari Rp 1562 Triliun.

Dengan pertumbuhan sebesar itu, secara riil nilai premi asuransi umum di Indonesia sebenarnya menurun karena persumbuhan secara nominalnya lebih rendah dari tingkat inflasi. Pertumbuhan nilai premi asuransi umum yang melambat diduga terkait juga dengan perang tarif- seperti disinyalir oleh Ketua Umum AAUI. "Harga premi yang ditawarkan sudah tidak rasional. Dengan premi yang sedemikian rendahnya, perusahaan asuransi bersangkutan dipastikan tidak bisa membayar saat terjadi klaim. Ini berarti dari awal mereka sudah tidak bertanggung jawab karena menarik premi dengan asumsi tidak akan terjadi klaim'. Demikianlah bunyi kutipan pernyataannya.

Perang tarif tersebut ternyata secara agregat menimbulkan kerugian terhadap industri asuransi umum. Secara teoritis, penurunan tarif bisa diidentikan dengan penurunan "harga jual" dari produk asuransi. Dengan menggunakan teori permintaan dan penawaran harga, penurunan tarif tersebut seharusnya bisa meningkatkan jumlah permintaan terhadap produk asuransi umum karena harganya dianggap murah oleh masyarakat. Namun kenyataannya, tingkat penjualan produk asuransi ternyata tidak mengikuti teori permintaan atau penawaran tersebut- dengan angka-angka seperti yang disebutkan Biro Riset Infobank di atas.

Jadi persaingan yang "kurang sehat" tersebut justru menyebabkan industri asuransi umum semakin terpuruk. Dari sudut pandang masyarakat, harga produk asuransi memang menjadi murah, namun demikian, total volume premi yang tidak meningkat secara signifikan menyebabkan beban asuransi dalam menghadapi potensi klaim menjadi meningkat. Terlepas dari kejadian bencana alam atau faktor resiko lainnya, nilai premi yang relatif kecil tersebut menyebabkan kemampuan asuransi umum untuk membayar klaim menjadi semakin berat. Dan ujung-ujung pendapatan perusahaan pun berkurang. Persoalan menjadi tambah rumit dengan adanya sinyalemen yang dikemukakan oleh Badan Media Asuransi Indonesia bahwa "Akibat tingginya kasus penolakan klaim oleh perusahaan asuransi, membuat jasa asuransi mendapat sorotan tajam dari masyarakat". Pernyataan tersebut sebenarnya bisa dikatakan "pukulan telak" karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap asuransi umum di Indonesia.

Hilangnya kepercayaan masyarakat- jika tidak disikapi secara tepat, merupakan persoalan serius yang bisa mengancam industri asuransi umum di Indonesia. Posisi lembaga keuangan sebagai *agent of trust* mendapat ujian "maha berat" tatkala dihadapkan dengan ketidakpercayaan masyarakat. Kondisi ini berpotensi membawa industri asuransi umum di Indonesia memasuki tahap kritis. Sebagai institusi yang menawarkan "bisnis janji"- karena layanan klaim yang baru terjadi di masa depan sesuai dengan resiko yang di-cover, komitmen industri asuransi umum terhadap masyarakat menjadi "harga" yang tidak bisa ditawar lagi. Selama prinsip tersebut diabaikan, maka industri asuransi umum akan semakin kritis dan tertinggal terus. Apalagi dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi- yang "suka-tidak suka", "mau-tidak mau", "siap-tidak siap" harus menjadi perhatian para insan atau pelaku di industri asuransi umum di Indonesia.

Posisi Global: Memprihatinkan

"Around the globe, the market share of traditional insurers has been challenged in recent years by a variety of forces"

World Insurance Report 2007

"Japan and newly industrialised Asian economies: non-life business coming under increasing price pressure"

World Insurance Outlook 2006

Nilai total premi dunia pada tahun 2006 adalah sebesar US\$ 3723,4 Milyar yang terdiri dari premi asuransi jiwa sebesar US\$ 2209,3 Milyar dan premi asuransi non-jiwa sebesar US\$ 1514 Milyar. Angka tersebut meningkat dengan rata-rata sebesar 7,7 persen untuk asuransi jiwa dan hanya 1,5 persen untuk asuransi non-jiwa (asuransi umum). Beberapa statistik selengkapnya untuk Indonesia serta dengan rata-rata regional, nasional, dan beberapa negara sebagai pembandingan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

	Nilai Premi (dalam US\$ juta)		Pertumbuhan (%)	% premi dari PDB	Per Kapita (dalam US\$)
	2006	2005			
Asuransi Jiwa					
Dunia	2 209 317	2 003 557	7.7	4.48	330.6
Asia	602 266	578 567	3.6	5.00	154.6
ASEAN	20 299	18 108	2.5	1.96	41.4
Jepang	362 766	378 729	-2.0	8.3	2 829.3
RRC	45 092	39 604	9.1	1.7	34.1
Singapur	7 080	6 562	2.0	5.4	1 616.5
Malaysia	4 881	4 487	2.0	3.2	189.2
Thailand	3 887	4 487	1.6	1.9	60.0
Indonesia	2 822	2 131	10.5	0.8	12.5
Asuransi Non-Jiwa					
Dunia	1 514 094	1 442 258	1.5	3.04	224.2
Asia	198 553	186 644	4.4	1.63	50.4
ASEAN	12 678	11 601	-0.6	1.01	21.4
Jepang	97 495	99 481	0.3	2.2	760.4
RRC	25 713	20 540	19.9	1.0	19.4
Singapur	3 695	3 486	0.2	1.1	341.2
Thailand	3 241	2 860	1.9	1.6	50.0
Malaysia	2 656	2 490	-0.4	1.7	103.0
Indonesia	2 027	1 904	-11.1	0.6	9.0

Sumber: World Insurance Outlook 2006

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai premi asuransi umum lebih rendah dibandingkan dengan asuransi jiwa yaitu 1.5 % berbanding 7.7%. Angka pertumbuhan tersebut sudah disesuaikan dengan tingkat inflasi di masing-masing negara, termasuk di Indonesia. Sebagian angka-angka pertumbuhan untuk negara-negara ASEAN di atas merupakan angka estimasi dari World Insurance Outlook 2006. Walaupun demikian, Indonesia memang tergolong yang mengalami pertumbuhan negatif secara riil, walaupun secara nominal nilai preminya meningkat dari tahun 2005. Artinya, pertumbuhan nilai premi asuransi umum di Indonesia lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi.

Posisi Indonesia dalam “dunia perasuransian global” memang tergolong mengkhawatirkan. Dilihat dari nilai preminya, Indonesia menempati ranking dunia ke-37 untuk asuransi jiwa dan ke-44 untuk nilai premi asuransi umum dari 88 negara yang dianalisis dalam World

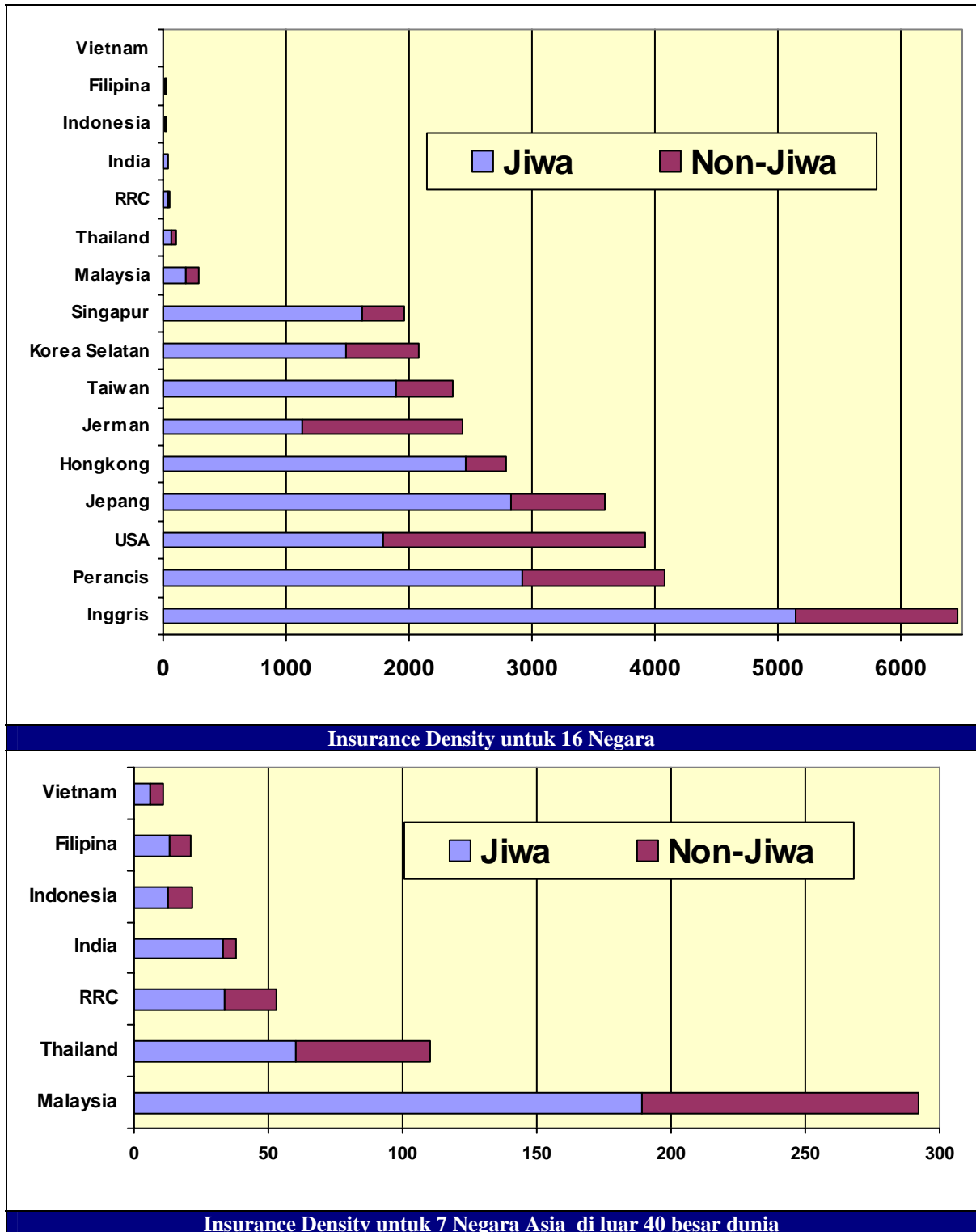
Insurance Outlook. Peringkat berdasarkan laju penetrasi asuransi (persentase premi terhadap PDB) dan densitas asuransi (premium per capita) malah semakin terpuruk yaitu menempati urutan ke-74 dan ke-78 untuk industri asuransi secara keseluruhan. Perbandingan ranking dunia untuk beberapa negara disajikan pada tabel di bawah ini.

Negara	Ranking Dunia (berdasarkan analisis terhadap 88 negara)			
	Premi Asuransi Jiwa	Premi Asuransi Non-Jiwa	<i>Insurance Penetration</i>	<i>Insurance Density</i>
Amerika Serikat	1	1	14	6
Jepang	2	4	7	9
Inggris	3	3	1	1
Perancis	4	5	6	5
Jerman	5	2	22	17
Korea Selatan	7	9	4	21
RRC	8	11	47	70
Taiwan	9	18	3	20
India	12	26	31	76
Hongkong	20	41	8	14
Singapura	28	34	23	22
Malaysia	32	37	29	41
Thailand	33	35	37	57
Indonesia	37	44	74	78
Filipina	41	55	73	80
Vietnam	49	71	72	84

Data ranking dunia di atas menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi yang lebih baik dibandingkan dengan Filipina dan Vietnam untuk nilai premi dan *insurance penetration*, namun ranking untuk *insurance density*-nya lebih rendah dari kedua negara tersebut. Tiga negara Asia yang relatif maju industri asuransinya adalah Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Ketiga negara tersebut memiliki nilai premi asuransi jiwa yang relatif besar sehingga menempati 10 besar dunia, walaupun untuk asuransi umum hanya Jepang dan Korea Selatan yang masuk papan atas.

Kasus yang menarik adalah RRC yang mempunyai nilai premi yang relatif besar sehingga menempati urutan ke-8 untuk jiwa dan ke-11 untuk non-jiwa. Namun dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, ranking *insurance density*-nya merosot ke urutan 70. Kondisi yang hampir sama berlaku juga untuk negara yang berpenduduk besar lainnya seperti India dan Indonesia. India yang tadinya menempati urutan ke-12 dan 26 untuk total premi asuransi jiwa dan non-jiwa, merosot ranking-nya menjadi urutan 31 dan 76 untuk *insurance penetration* dan *insurance density*. Walaupun RRC, India, dan Indonesia sama-sama berada di urutan tujuh puluhan, jumlah penduduk India dan RRC adalah lebih dari 4

kali lipat dari Indonesia. Jadi kemerosotan ranking Indonesia lebih banyak disebabkan karena total premi dan PDB yang jauh lebih rendah dibandingkan India dan RRC. Perbandingan nilai *insurance density* untuk 16 negara pada tabel di atas selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber data : World Insurance Outlook 2006 (diolah kembali)

Sekali lagi, dengan menggunakan nilai kurs sebesar Rp 9500/US\$, nilai *insurance density* Indonesia menunjukkan bahwa belanja premi asuransi umum untuk setiap orang per tahunnya hanya Rp 85.500. Angka yang sangat kecil tersebut bisa diartikan juga bahwa kesadaran “berasuransi” di kalangan masyarakat Indonesia masih rendah. Hal ini bisa disebabkan kurang intensifnya “user education” yang dilakukan oleh pelaku asuransi umum. Atau “jangan-jangan”, kondisi tersebut juga diperparah dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk asuransi seperti sudah dipaparkan sebelumnya. Lalu bagaimana kontribusi asuransi umum terhadap struktur perekonomian Indonesia?

Insurance penetration yang masih rendah menunjukkan bahwa asuransi belum menjadi sub sektor “primadona” dalam perekonomian sebuah negara. Dengan angka *insurance penetration* sebesar 0,8% untuk jiwa dan 0,6% untuk non-jiwa, asuransi di Indonesia memang masih bisa dianggap “sebelah mata” karena kontribusinya dalam struktur perekonomian Indonesia yang masih rendah. *Insurance penetration* Indonesia masih sangat jauh dari rata-rata dunia yang sudah mencapai 4,48% untuk asuransi jiwa dan 3,04% untuk non-jiwa. Indonesia malah masih di bawah rata-rata Asia dan ASEAN yang untuk asuransi umumnya sudah mencapai 1,63% dan 1,01%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asuransi di Indonesia- dalam kasus ini asuransi umum lebih “parah lagi” di bandingkan asuransi jiwa, masih belum “muncul” dalam struktur perekonomian Indonesia. Artinya peranan asuransi masih sangat kecil dalam menunjang perekonomian nasional. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hubungan teoritis dan empiris antara perkembangan asuransi dengan perkembangan perekonomian sebuah negara?

Masih Bergantung pada Pertumbuhan Ekonomi

”Faktor yang menghambat pertumbuhan asuransi umum antara lain kondisi perekonomian yang belum memadai, bencana alam, dan kebijakan yang kurang kondusif”

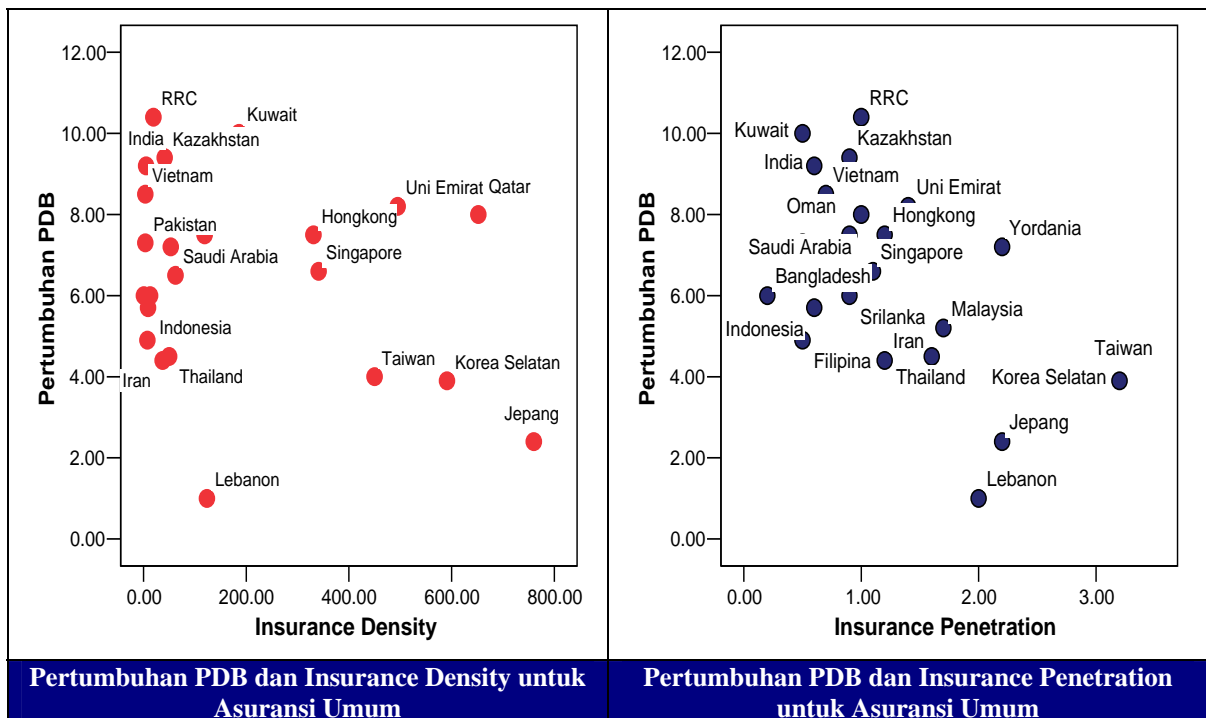
Frans Y. Sahusilawane- Ketua Umum AAUI, dikutip dari Website AAUI

Pernyataan dari salah satu praktisi atau pelaku kunci di asuransi umum tersebut di atas seolah-olah merupakan ”pengakuan” yang ”jujur dan lugas” bahwa perkembangan asuransi umum di Indonesia masih menggantungkan diri pada kondisi perekonomian dan faktor eksternal lainnya. Dengan kata lain, jika kondisi ekonomi memburuk maka asuransi umum akan ”kena getahnya”. Kondisi di Indonesia tersebut relatif kontradiktif dengan analisis

dari World Insurance Outlook yang justru menunjukkan pertumbuhan industri asuransi dunia pada tahun 2006 relatif stabil- walaupun untuk asuransi umum lebih rendah pertumbuhannya. Yang perlu dicermati dari laporan tersebut adalah perkiraan bahwa pada tahun 2007 ini asuransi umum cenderung stagnan dilihat dari pertumbuhan preminya.

Kondisi asuransi global yang cenderung membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi global, serta adanya fenomena menarik bahwa pertumbuhan premi- baik jiwa maupun umum- cenderung terjadi pada negara-negara maju atau negara industri baru, menimbulkan hipotesis bahwa pertumbuhan asuransi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Cuma masalahnya seperti pepatah klise: "Ayam dulu baru telur, atau sebaliknya?". Artinya apakah suatu negara harus tumbuh dulu perekonomiannya sebelum pertumbuhan industri asuransinya?

Mari kita lihat analisis data-data empiris mengenai pertumbuhan PDB- yang bisa digunakan sebagai salah satu indikator perkembangan ekonomi suatu negara, dengan *insurance penetration rate* dan *insurance density*. *Insurance penetration rate* diukur dengan persentase total premi terhadap PDB sedangkan *insurance density* merupakan total premium per kapita. Dengan menggunakan data *cross-sectional* dari 24. negara di Asia pada tahun 2006, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan *insurance density* (premi per kapita) untuk asuransi umum secara deskriptif dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



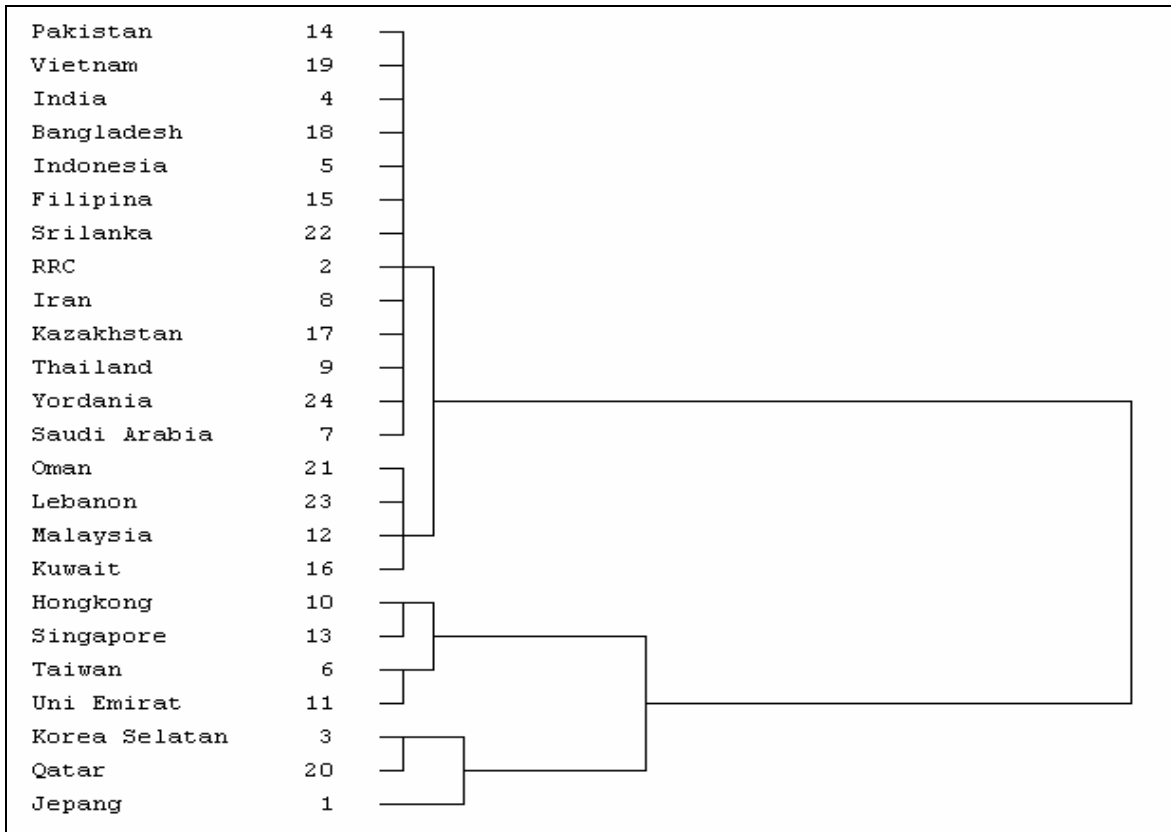
Sumber: Hasil analisis penulis terhadap data 24 negara Asia dari World Insurance Outlook 2006.

Dari data *cross-sectional* 24 negara di Asia, terlihat bahwa tidak ada pola hubungan yang jelas antara pertumbuhan PDB dengan *insurance penetration* dan *insurance density*. Namun demikian, ada pengelompokan negara berdasarkan pola hubungan tersebut. Penulis mengelompokkan negara-negara Asia tersebut dalam 4 kelompok berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan *insurance density*, yaitu:

1. Kelompok I adalah negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi dan *insurance density* yang tinggi. Hongkong, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Singapura masuk dalam kelompok ini.
2. Kelompok II adalah negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi menengah dengan *insurance density* yang tinggi. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan masuk dalam kelompok ini
3. Kelompok III adalah negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan *insurance density* yang rendah. RRC, India, Kazakhstan, Vietnam dan Kuwait masuk dalam kelompok ini
4. Kelompok IV adalah negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi dan *insurance density* yang rendah. Indonesia, Thailand, Iran, dan Lebanon termasuk dalam kelompok ini.

Pengelompokan tersebut relatif tidak berubah signifikan untuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan *insurance penetration*. Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam meningkatkan peranan asuransi umum dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, pelaku asuransi umum masih harus berjuang untuk meningkatkan volume penjualan produk asuransi ke masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah menjadi tantangan untuk sektor atau pelaku ekonomi lainnya. Industri asuransi umum sendiri belum banyak memberikan kontribusi dalam meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia. Dilihat dari posisi kuadrannya, Indonesia masih memerlukan waktu dan tahapan yang relatif panjang untuk mencapai kelompok I.

Pengelompokan negara-negara tersebut juga bisa dianalisis dengan menggunakan *Hierarchical-Cluster Analysis*. Dengan menggunakan tiga indikator sekaligus- yaitu pertumbuhan ekonomi, *insurance penetration*, dan *insurance density*, pengelompokan negara-negara di Asia selengkapny dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Analisis penulis dengan hierarchical-cluster analisis terhadap data World Insurance Outlook 2006

Berdasarkan hasil analisis tersebut, 7 negara “papan atas” di Asia adalah Jepang, Qatar, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Taiwan, Singapura, dan Hongkong. *Lagi-lagi* Indonesia masih tergolong “papan bawah”. Sebuah tantangan berat di dalam mewujudkan industri asuransi umum yang kuat dan sehat ditengah terpaan kondisi perekonomian Indonesia yang masih “tertatih-tatih” dalam upaya memulihkan “warisan” krisis ekonomi sebelumnya.

Analisis data empiris tersebut di atas masih belum menunjukkan bagaimana hubungan kausalitas antara perkembangan ekonomi dengan pertumbuhan industri asuransi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Penelitian Ward and Zurbruegg (2000) terhadap data longitudinal dari 9 negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menunjukkan bahwa ada beberapa negara yang menunjukkan industri asuransinya memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi negaranya. Namun pada beberapa negara lainnya, justru sebaliknya yaitu

pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri asuransi di negara tersebut. Kesimpulan akhirnya adalah hubungan tersebut sangat bersifat khusus untuk setiap negara sehingga kontribusi industri asuransi terhadap perkembangan ekonomi masih sangat tergantung faktor-faktor nasional lainnya.

2. Adams dkk (2005) meneliti peranan bank dan asuransi terhadap perkembangan ekonomi di Swedia dengan menggunakan data antara tahun 1830 sampai 1998. Swedia sendiri tergolong negara yang premi per kapita-nya tinggi yaitu sebesar US\$3662 dan menempati urutan ke-13 dunia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa industri perbankan lebih banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Swedia, sedangkan pertumbuhan industri asuransinya justru lebih dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Bahkan pertumbuhan industri perbankan ikut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri asuransi di Swedia.
3. Hais and Sumegi (2006) menyatakan bahwa industri asuransi bersama-sama dengan lembaga keuangan lainnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun khusus untuk industri asuransi sendiri, penelitian tersebut tidak menemukan adanya korelasi antara pendapatan premi asuransi dengan pertumbuhan PDB.

Hasil kajian empiris penulis dan beberapa perspektif teoritis serta hasil-hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa ketergantungan industri asuransi umum di Indonesia terhadap perkembangan ekonomi memang merupakan kenyataan yang ada justifikasinya. Kenyataan tersebut bukan berarti industri asuransi Indonesia tidak bisa melakukan agenda atau langkah-langkah strategis dalam konteks perekonomian Indonesia. Kondisi dan tantangan berat memang masih harus dihadapi saat ini dan di masa depan. Namun masih ada secercah harapan yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan industri asuransi umum yang sehat dan tangguh di Indonesia.

Masih Ada Harapan

“Global economy: solid growth and booming financial markets”

World Insurance Outlook 2006

“Insurance plays a key role in economic stability. The insurance sector provides a long-term source of finance for investment in the economy, thus contributing to sustainable growth”

Insurers of Europe (2006)

Industri asuransi umum Indonesia harus diakui memang menghadapi masalah dan tantangan yang berat, baik dalam cakupan nasional maupun global. Perkembangan angka atau statistik menunjukkan bahwa industri asuransi umum sedang menghadapi tahap-tahap kritis. Regulasi dan situasi pasar pun masih relatif kurang kondusif ditengah-tengah ancaman ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaku industri asuransi umum. Namun ditengah masa kritis ini, penulis masih punya keyakinan bahwa industri asuransi umum di Indonesia masih bisa bangkit dan menata diri dalam upaya meningkatkan gairah perasuransian dalam konteks kegiatan ekonomi Indonesia.

Ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi memang suatu kenyataan, namun bukan berarti industri asuransi umum tidak bisa memberikan kontribusi apapun dalam pembangunan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Kekhususan asuransi umum dalam memberikan jasa khusus dibidang proteksi dan transfer resiko terkait dengan perlindungan aset individu dan institusi menjadi modal dasar yang bisa dimanfaatkan. Harapan dalam membantu perekonomian Indonesia pun mulai bisa diwujudkan dengan beberapa agenda dan kebijakan yang tepat.

Agenda Pertama, konsolidasi internal menjadi salah satu langkah awal. Beberapa praktek asuransi yang sehat harus segera diimplementasikan secara tegas termasuk aspek pengawasannya, diantaranya adalah penetapan *Risk Based Capital*, pemberlakuan *risk based pricing*, dan penerapan *good corporate governance*.

Risk Based Capital memang idealnya dibarengi dengan peningkatan kemampuan modal yang besar. Jika pemberlakuan modal minimum 100 Milyar dianggap masih terlalu berat, pelaku asuransi umum beserta regulator harus mempunyai agenda yang jelas mengenai pemberlakuan peraturan tersebut- dengan tetap memperhatikan regulasi solvensi yang mempertimbangkan alokasi optimal dari modal sesuai dengan sistem berbasis resiko ekonomi. Alternatif untuk penggabungan usaha bisa dikaji secara seksama dalam rangka memperkuat permodalan. *Toh* dengan jumlah asuransi umum sebanyak 92 perusahaan, Indonesia tergolong Negara yang mempunyai jumlah perusahaan yang tertinggi.

Program Arsitektur Asuransi Indonesia harus mempunyai agenda yang jelas beserta target pencapaiannya. Jumlah perusahaan yang relatif sedikit namun dengan kapasitas usaha dan jangkauan operasional yang mendunia adalah pilihan terbaik di era globalisasi saat ini.

Muara akhir dari tahap konsolidasi ini adalah struktur industri asuransi umum yang kuat yang bisa menjaga stabilitas keuangan dan aliran investasi ke lembaga keuangan lainnya menjadi lebih besar.

Risk Based Pricing memang sulit diterapkan disaat terjadinya perang tarif yang disinyalir terjadi saat ini. Dengan tariff hanya 1%- dari yang seharusnya 3%, menjadi salah satu indikasi bahwa beberapa pelaku asuransi umum di Indonesia mengabaikan prinsip *risk base pricing* ini. Selama tidak ada regulasi- termasuk penegakan hukum dan kejelasan *code of conduct* yang disepakati bersama, penerapan *risk based pricing* (RBP) memang tidak akan berhasil dalam mengurangi- kalau tidak bisa menghilangkan perang tarif. Langkah-langkah tersebut harus diimbangi dengan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat mengenai tarif yang wajar sesuai dengan standar produk dan layanan minimal yang diberikan. Dalam konteks kegiatan ekonomi, penerapan RBP ini bisa membantu dalam penerapan biaya standar aset atau properti yang dilindungi dengan asuransi.

Menjaga kepercayaan masyarakat merupakan tujuan dari integritas individu dan institusi di industri asuransi umum. Regulator, AAUI, atau pemangku kepentingan lainnya harus mempunyai agenda yang jelas dalam menangani masalah integritas ini. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)- baik di tingkat pengelola perusahaan maupun di tingkat pemegang saham. Keberhasilan implementasi GCG mempunyai kaitan erat dengan kegiatan perekonomian, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ketidakpastian pembayaran klaim atau penyalahgunaan keuangan di industri asuransi umum akan berdampak pada ketidakpastian keuangan di sektor lainnya yang berhubungan dengan industri asuransi umum.

Agenda Kedua, asuransi umum dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi melalui mekanisme *risk transfer*, produk substitusi simpanan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan investasi. Transfer resiko merupakan kekhususan asuransi yang bisa menghindari atau mencegah resiko yang dihadapi pelaku ekonomi lainnya sehingga bisa menjaga nilai kekayaan asetnya, menghindari fluktuasi atau ketidakstabilan nilai asset, serta mendukung kenyamanan dalam melakukan kegiatan ekonominya. Tantangannya adalah bagaimana pelaku ekonomi lainnya memahami mekanisme transfer resiko tersebut dalam upaya mendukung kegiatan ekonomi mereka. Nilai *insurance density* Indonesia yang masih rendah menunjukkan bahwa masih banyak pelaku ekonomi lainnya yang masih belum memanfaatkan jasa asuransi umum. Potensi pertumbuhan sektor properti, industri

manufaktur, dan otomotif harus menjadi lahan garapan para pelaku asuransi umum. Masalah kepedulian terhadap resiko (*awareness of risk*) dari sektor-sektor ekonomi lainnya menjadi pekerjaan rumah- yang jika bisa diselesaikan dengan baik akan memberikan kontribusi yang besar terhadap kegiatan ekonomi Indonesia.

Produk substitusi simpanan merupakan alternatif lain dalam upaya meningkatkan mobilisasi dana masyarakat. Dari perspektif konsumen atau masyarakat, variasi produk asuransi ini bisa memperluas pilihan investasi. Pilihan investasi yang lebih banyak ini akan mendorong efisiensi intermediasi dana-dana dari pihak surplus unit ke defisit unit, yang muara akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, hampir sebagian dana masyarakat saat ini lebih banyak tersimpan di bank atau instrumen keuangan lain yang tidak berdampak pada perkembangan sektor riil secara langsung- misalnya obligasi pemerintah atau SBI. Dengan adanya variasi produk asuransi yang inovatif, masih ada peluang memanfaatkan sebagian dana masyarakat tersebut. Memang variasi tersebut tidak seluas dan seluwes produk asuransi jiwa yang sudah mulai marak dengan dilengkapi dengan unsur investasinya. Tetapi dengan bekerja sama dengan pelaku ekonomi lainnya- penetrasi variasi produk tersebut masih bisa ditingkatkan.

Tantangannya adalah resistensi masyarakat terhadap asuransi kerugian. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa bayar asuransi adalah "buang uang" karena uang tersebut memang hilang selama mereka tidak mengalami resiko terkait dengan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat cenderung melakukan *self-insurance*. Padahal dalam konteks keuangan, *self-insurance* tersebut berpotensi mengganggu *cash-flow* atau ketidakstabilan keuangan. Disinilah peranan utama asuransi umum dalam mendukung kegiatan ekonomi atau menjaga kegiatan ekonomi. Stabilitas keuangan tersebut muara akhirnya adalah stabilitas ekonomi.

Investasi perusahaan asuransi umum memang relatif lebih *short-term* dibandingkan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi umum pun tidak bisa leluasa dalam rangka menjaga *liquidity and maturity* dari kegiatan investasinya. Belum lagi peraturan yang membatasi jenis dan nilai investasi untuk masing-masing alternatif investasi- termasuk larangan jenis investasi tertentu. Mungkinkah investasi oleh asuransi umum lebih "bebas"? Sebenarnya dengan pemberlakuan *Risk Based Capital*, secara teoritis kegiatan investasi asuransi umum bisa lebih luas- baik dari sisi jenis maupun nilai investasinya. Prinsipnya sederhana, jika investasi tersebut lebih beresiko maka kompensasinya perusahaan asuransi umum harus

mempunyai struktur modal yang kuat. Jadi jika terjadi resiko kerugian investasi maka kerugian tersebut harus diambil dari cadangan kerugian yang dialokasikan dari modal perusahaan asuransi. Dalam hal ini, kerugian tersebut tidak mengurangi kewajiban klaim yang tetap harus dijaga.

Masalahnya adalah 74 dari 92 perusahaan asuransi umum mempunyai modal di bawah 100 Milyar. Jadi secara internal, sebagian besar perusahaan asuransi umum di Indonesia akhirnya mempunyai kemampuan investasi yang terbatas juga. Alternatif investasinya pun terbatas pada simpanan deposito atau alternatif investasi lainnya yang relatif “risk-free”-tetapi dengan “trade-off” memperoleh tingkat keuntungan yang lebih rendah. Akhirnya kegiatan asuransi umum pun tidak memberikan efek berantai yang optimal terhadap perekonomian. Jika kendala-kendala tersebut dihilangkan maka peranan asuransi umum dalam meningkatkan kegiatan ekonomi akan lebih meningkat. Dampak tersebut akan semakin kuat jika dilakukan deregulasi kegiatan investasi dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Agenda Ketiga, jika asuransi umum akhirnya tetap hanya mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi, peluang untuk tumbuh dan berkembang masih ada. Berdasarkan proyeksi pemerintah dan perkembangan indikator makro, perekonomian Indonesia di tahun-tahun yang akan datang diperkirakan meningkat. Namun bukan berarti jika perekonomian Indonesia meningkat maka industri asuransi umum juga meningkat dengan presentase yang sama. Misalnya, jika pertumbuhan PDB tahun 2008 naik 7% dibandingkan tahun 2007, maka industri asuransi umum juga meningkat dengan persentase yang sama. Seberapa persen industri asuransi umum bisa tumbuh dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi tersebut masih tergantung pada empat aspek.

Aspek pertama berkaitan dengan kesiapan dari industri asuransi itu sendiri, termasuk juga program atau agenda yang sudah dibahas sebelumnya pada dua agenda di atas. Selama persoalan yang terkait dengan agenda pertama dan agenda kedua tersebut tidak dijalankan dengan tepat, maka perkembangan ekonomi tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh industri asuransi umum. Jadi aspek pertama ini merupakan prasyarat pertama agar industri asuransi umum bisa memanfaatkan perkembangan ekonomi nasional.

Aspek kedua tergantung dari struktur ekonomi Indonesia sendiri- yang menunjukkan distribusi presentase PDB untuk masing-masing sektor. Dari struktur ekonomi itu sendiri

secara umum bisa diketahui apakah suatu negara merupakan negara agraris, industri, atau pertanian. Secara teoritis, negara industri tentunya mempunyai potensi permintaan terhadap asuransi umum yang lebih besar dibandingkan negara agraris. Pertumbuhan PDB sebesar 7% adalah agregat- atau rata-rata untuk seluruh sektor dan sub sektor. Pelaku asuransi umum harus mencermati juga pertumbuhan untuk setiap sektor atau sub sektor tersebut. Peningkatan PDB untuk sektor manufaktur yang tinggi akan lebih “disukai” oleh para pelaku asuransi umum dibandingkan dengan peningkatan PDB untuk sektor pertanian. Alasannya potensi permintaan asuransi umum akan lebih besar di sektor manufaktur dibandingkan sektor pertanian.

Aspek ketiga terkait dengan implementasi otonomi daerah. Nilai dan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga berpotensi memberikan dampak terhadap potensi permintaan asuransi umum. Argumentasinya relatif sama dengan analisis struktur ekonomi yang tercermin dalam komposisi PDB atau APBN. Dengan kebijakan desentralisasi keuangan ini, setiap daerah mungkin mempunyai daya tarik yang berbeda-beda dilihat dari sudut pandang tingkat permintaan asuransi umum. Analisis terhadap APBD atau keuangan daerah tersebut tentunya memberikan kontribusi dalam pertumbuhan asuransi umum di Indonesia.

Aspek keempat berhubungan dengan perubahan struktur sosial, khususnya perubahan kelas menengah ke atas. Harus diakui bahwa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran produk asuransi umum adalah masyarakat menengah ke atas. Kelompok masyarakat tersebut mempunyai daya beli yang tinggi, termasuk diantaranya berpotensi untuk mengalokasikan konsumsinya ke jasa asuransi umum. Secara agregat, peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari pendapatan per kapita. Namun informasi tersebut harus dilengkapi dengan bagaimana distribusi pendapatan tersebut untuk setiap strata masyarakat. Selain itu, pola konsumsi masyarakat juga bisa dijadikan informasi yang bermanfaat. Jadi jika terjadi perubahan struktur sosial yang menunjukkan angka kemiskinan yang semakin tinggi, maka perubahan sosial tersebut secara umum menunjukkan sinyal negatif untuk asuransi umum.

Keempat aspek untuk agenda ketiga tersebut secara umum perlu dicermati dan dianalisis dampaknya terhadap asuransi umum di Indonesia. Namun kesimpulan akhirnya adalah bagaimana pelaku asuransi umum di Indonesia bisa merubah potensi permintaan asuransi umum menjadi pembelian riil terhadap produk atau jasa asuransi umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, M., J. Andersson, L.F. Andersson, and M. Lindmark. The Historical Relation between Banking, Insurance and Economic Growth in Sweden: 1830 to 1998. School of Business & Economics, University of Wales Swansea, 2005.
- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Website diakses tanggal 13 Desember 2007.
- Bank Indonesia, "Buku Statistik Perbankan Indonesia, Direktorat Perizinan dan Informansi Perbankan", Jakarta, 2007
- CEA, Insurer of Europe. The Contribution of the Insurance Sector to Economic Growth and Employment in the EU. Brussel, 2006.
- European Financial Management & Marketing Association (EFMA). 2007 World Insurance Report. Capgemini, 2007.
- Hacker, Jacob S. Universal Insurance: Enhancing Economic Security to Promote Opportunity. Discussion Paper 2006-07, The Brookings Institution, 2006.
- Haiss, Peter R. and K. Sumegi. The Relationship of Insurance and Economic Growth – A Theoretical and Empirical Analysis. Paper for presentation at the 2006 EcoMod Conference, Hongkong, June 28-30, 2006.
- Swiss Reinsurance Company. World insurance in 2006: Premiums came back to "life". Switzerland, 2007.
- WARD, Damian and R. Zurbruegg. Does Insurance Promote Economic Growth?: Evidence from OECD Countries. School of Banking & Finance, University Of New South Wales, Sydney, 2000.